

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMUNGUTAN PPH PASAL 23
SEBAGAI WAPU DALAM UPAYA MEMENUHI KEPATUHAN
KETENTUAN PERPAJAKAN (Studi Kasus Pada PT Provinces Indonesia)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Akademik Dan Melengkapi
Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Mencapai Gelar sarjana Ekonomi**

Jurusan Akuntansi

Oleh

TUTIK KURNIATI

2010420004



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DARMA PERSADA**

JAKARTA

2015

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Tutik Kurniati

No.Pokok : 2010420004

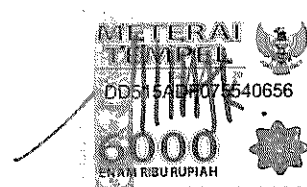
Jurusan/Peminatan : Akuntansi/Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul **PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMUNGUTAN PPH PASAL 23 SEBAGAI WAPU DALAM UPAYA MEMENUHI KEPATUHAN KETENTUAN PERPAJAKAN (Studi Kasus Pada PT Provinces Indonesia)** yang dibimbing oleh Bapak Drs. Haryanto,AK,MM, adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan maupun mengcopy sebagian dari hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, saya bersedia mempertanggung jawabkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di Jakarta pada tanggal 18 September 2015.

Yang menyatakan



Tutik Kurniati

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Tutik Kurniati

No. Pokok : 2010420004

Jurusan : Akuntansi

Peminatan : Akuntansi Perpajakan

Judul Skripsi : **PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMUNGUTAN PPH PASAL 23 SEBAGAI WAPU DALAM UPAYA MEMENUHI KEPATUHAN KETENTUAN PERPAJAKAN (Studi Kasus Pada PT Provinces Indonesia)**

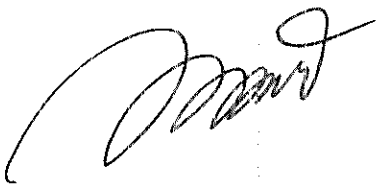
Telah diperiksa, dan disetujui untuk diajukan dan diujikan dalam sidang Ujian Skripsi Sarjana tanggal 31 Agustus 2015.

Jakarta, 18 September 2015

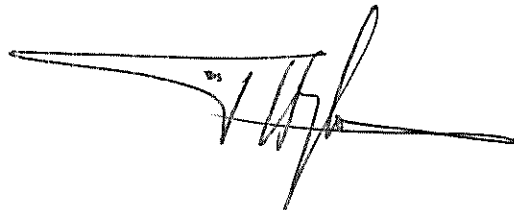
Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

Pembimbing



(Ahmad Basid Hasibuan, SE, M.Si)



(Drs.Haryanto,AK,MM)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tutik Kurniati

No. Pokok : 2010420004

Jurusan : Akuntansi

Peminatan : Akuntansi Perpajakan

Judul Skripsi : **PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMUNGUTAN PPH PASAL 23 SEBAGAI WAPU DALAM UPAYA MEMENUHI KEPATUHAN KETENTUAN PERPAJAKAN (Studi Kasus Pada PT Provinces Indonesia)**

Telah diperiksa, dikaji dan diujikan dalam sidang Ujian Skripsi Sarjana tanggal 31 Agustus 2015 dengan hasil B.




Jakarta, 18 September 2015

Ketua jurusan Akuntansi



(Ahmad Basid Hasibuan, SE, M.Si)

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

No	Nama Penguji	Jabatan Penguji	Tanda Tangan
1	Drs. Haryanto, AK, MM	Ketua Penguji	
2	Jombrik, SE, MM	Anggota Penguji	
3	Atik Isniawati, SE, M.si	Anggota Penguji	

Dekan Fakultas Ekonomi



Sukardi HS, SE, MM

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMUNGUTAN PPH PASAL 23
SEBAGAI WAPU DALAM UPAYA MEMENUHI KEPATUHAN
KETENTUAN PERPAJAKAN (Studi Kasus Pada PT Provinces Indonesia)**

Nama : Tutik Kurniati

NIM : 2010420004

ABSTRAK

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23), mengatur pemotongan pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak di dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi atas pemungutan PPh Pasal 23 sebagai wapu terhadap tenant sebagai upaya untuk mematuhi ketentuan perpajakan pada PT Provinces Indonesia. Objek penelitian ini dilakukan di PT Provinces Indonesia dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT Provinces Indonesia telah melakukan pencatatan perlakuan akuntansi atas pemungutan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Kata kunci : PPh Pasal 23, Perhitungan dan pelaporannya, perlakuan akuntansi

ABSTRACT

Income Tax Article 23 (article 23) , set the withholding tax imposed on income tax payer in the country and permanent establishments derived from the capital , the delivery of services or carrying out activities other than those income tax of Article 21. This study aims to analyze the accounting treatment of Income Tax Article 23 as wapu against the tenant in an effort to comply with tax regulations on PT Provinces Indonesia . The object of this study conducted in Indonesia with PT Provinces deskriptif qualitative analysis method . From the results of this study concluded that PT Provinces Indonesia has made recording the accounting treatment of Income Tax Article 23 in accordance with tax regulations .

Keywords : article 23 , calculation and reporting, accounting treatment

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini,yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga memungkinkan skripsi ini terwujud. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Kedua Orang tuaku yang selalu memberikan dorongan kepada penulis.
Thanks Mom & dad, you're my angel's
2. Pembimbing Materi dan teknis Bapak Drs.Haryanto,AK,MM
3. Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Sukardi HS,SE,MM
4. Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Bapak Ahmad Basid Hasibuan, SE, M.Si
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi
6. Segenap staf dan karyawan serta pimpinan PT Provinces Indonesia unit Bakrie Tower yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset dan mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis.
7. Kepada sahabat-sahabatku yang tercinta (Vera,Nindy, Mitri dan Nia) terimakasih buat persahabatan kita selama ini
8. Teman-teman seperjuangan, Akuntansi 2010 terimakasih buat kebersamaannya selama ini

9. Semua rekan-rekan yang telah membantu dan mendorong dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat dengan baik.

Jakarta, 18 September 2015

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a long diagonal stroke followed by several vertical and horizontal strokes, ending with a period.

Tutik Kurniati

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	2
1.3.1 Tujuan Penelitian	2
1.3.2 Kegunaan Penelitian	3
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Pajak	4
2.2 Fungsi Pajak	5
2.2.1 Fungsi Budgetair	6
2.2.2 Fungsi Regulered	6
2.3 Azas Pemungutan Pajak	6
2.3.1 Azas Tempat Tinggal	6
2.3.2 Azas Kebangsaan	7
2.3.3 Azas Sumber	7
2.4 Dasar Hukum Pemungutan Pajak	9
2.5 Jenis Pungutan Indonesia	12
2.5.1 Pajak Penghasilan	12

2.5.2 PPhBM dan PPh Barang dan Jasa	13
2.5.3 PBB	13
2.5.4 Bea Materai	13
2.5.5 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	13
2.5.6 Penerimaan Negara yang berasal dari Migas	13
2.6 Sistem Pemungutan Pajak	13
2.6.1 Official Assessment System	13
2.6.2 Self Assessment System	13
2.6.3 Withholding System	14
2.7 Jenis-Jenis Pajak	14
2.7.1 Berdasarkan Golongannya	14
2.7.2 Berdasarkan Sifatnya	16
2.7.3 Menurut Lembaga Pemungut	17
2.8 Subjek Wajib Pajak	17
2.8.1 Domisili	19
2.8.2 Presensi	19
2.8.3 Niat	19
2.9 Objek Pajak	19
2.9.1 Penggantian atau Imbalan	19
2.9.2 Hadiah dari Undian	19
2.9.3 Laba Usaha	19
2.9.4 Keuntungan Penjualan	19
2.10 Konsep Penghasilan	23
2.10.1 Definisi Pajak Penghasilan	24
2.10.2 Subjek Pajak Penghasilan	26
2.10.2.1 Subjek Pajak Dalam Negeri	27

2.10.2.2 Subjek Pajak Luar Negeri	28
2.10.3 Objek Pajak Penghasilan	28
2.10.4 Wajib Pajak Pribadi	30
2.10.5 Wajib Pajak Badan	31
2.10.5.1 Pengertian BUT	32
2.10.5.2 Subjek PPh Wajib Pajak Badan	33
2.11 Pajak Penghasilan Pasal 23	35
2.12 Pengertian Akuntansi	39
2.13 Prinsip-prinsip Akuntansi	40
2.14 Perlakuan Akuntansi	41
2.15 Kerangka Pikir	42

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	43
3.2 Jenis Data	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data	43
3.3.1 Penelitian Pustaka	43
3.3.2 Penelitian Lapangan	43
3.4 Metode Analisis Data	44

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Sekilas Mengenai PT Provinces Indonesia	45
4.2 Visi dan Misi	45
4.2.1 Visi	45
4.2.2 Misi	45
4.3 Properti yang dikembangkan Oleh PT Provinces Indonesia	46
4.4 Nilai-Nilai Perusahaan	49
4.5 Hasil Pembahasan	50

4.6 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23	73
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	75
----------------------	----

5.2 Saran	76
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk membiayai pembangunan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Negara memerlukan dana dalam jumlah yang sangat besar dan salah satu sumber dananya adalah dari penerimaan pajak.

Pajak yang dipungut dari warga Negara Indonesia adalah salah satu kewajiban yang penagihannya dapat dipaksakan. Berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka suatu reformasi perpajakan telah dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang bertujuan agar para wajib pajak lebih patuh untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, sehingga jangan sampai terkena sanksi karena lalai membayar pajak. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan berbagai upaya termasuk memberikan sosialisasi kepada pribadi atau perusahaan sebagai wajib pajak mengenai manfaat dan sanksi terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Di lain pihak, pribadi atau masyarakat selaku wajib pajak diharapkan menyadari manfaat dan sanksi kepatuhan pembayaran pajak, untuk itu dituntut untuk mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan

perpajakan, karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat berdampak perdata maupun pidana.

Untuk menghindari dampak negatif tersebut, PT Provinces Indonesia sebagai salah satu anak Bakrie Group yang mendapat tugas dari Holding Company Bakrie Group untuk mengelola penyewaan beberapa propertynya, dituntut untuk melakukan fungsinya dengan baik termasuk pengelolaan pajaknya. Untuk itu, PT Provinces Indonesia perlu menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi ini dengan judul “Perlakuan Akuntansi Atas Pemungutan PPh Pasal 23 Terhadap Tenant Sebagai Wapu Dalam Upaya Memenuhi Kepatuhan Ketentuan Perpajakan (Studi Kasus pada PT Provinces Indonesia).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana cara menghitung serta perlakuan akuntansi atas pemungutan PPh Pasal 23 terhadap tenant sebagai Wapu?
- b. Apakah perlakuan akuntansi atas pemungutan PPh pasal 23 sebagai Wapu tersebut telah memenuhi ketentuan perpajakan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian :

- a. Untuk menganalisis perhitungan serta perlakuan akuntansi atas pemungutan PPh pasal 23 sebagai Wapu terhadap Tenant oleh PT Provinces Indonesia.
- b. Untuk menganalisis pemenuhan ketentuan perpajakan dalam hubungannya dengan perlakuan akuntansi atas pemungutan PPh pasal 23 tersebut sebagai Wapu.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, menambah pengetahuan, kemampuan dan wawasan khususnya yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas pemungutan PPh pasal 23 terhadap Tenant sebagai Wapu dalam upaya memenuhi kepatuhan ketentuan perpajakan.
- b. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi masukan khususnya yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas pemungutan PPh pasal 23 terhadap Tenant sebagai Wapu dalam upaya memenuhi kepatuhan ketentuan perpajakan.
- c. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, khususnya yang berkaitan dengan kajian perlakuan akuntansi atas pemungutan PPh pasal 23 terhadap Tenant sebagai Wapu dalam upaya memenuhi kepatuhan ketentuan perpajakan.